

**PERANAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI KECAMATAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

TESIS

OLEH

**MERY SUSANTI
NPM. 201801077**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/1/23

**PERANAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI KECAMATAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**MERY SUSANTI
NPM. 201801077**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERANAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Nama : MERY SUSANTI

NPM : 201801077

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II



Dr. Adam, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 02 September 2022

Nama : MERY SUSANTI

NPM : 201801077



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA
Sekretaris : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP
Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/1/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2022

Yang menyatakan,



MERY SUSANTI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MERY SUSANTI
NPM : 201801077
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERANAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



MERY SUSANTI

ABSTRAK
PERANAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA

Oleh
MERY SUSANTI

201801077

Pembimbing I Dr. Syafruddi Ritonga, MAP

Pembimbing II Dr. Adam, MAP

Dinas pertanian selalu berupaya memberdayakan para petani terutama yang tergabung dalam Kelompok tani yang ada di Kecamatan Portibi belum dapat berjalan dengan hasil yang optimal hal ini karena dihadapkan kepada berbagai permasalahan diantaranya adalah terbatasnya sarana dan prasarana, kualitas SDM petugas dan anggota kelompok tani. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Dinas Pertanian Dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan untuk menganalisis kendala dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori peranan dari Iyas Yusuf (stabilisator, fasilitator dan regulator). Hasil penelitian ini menunjukkan peranan dinas pertanian Dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sudah berjalan tetapi belum optimal. Faktor kendala dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain anggaran yang terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana. Saran dari penelitian ini melaksanakan Diklat Teknis untuk petani dan petugas, Dukungan dana yang memadai agar disediakan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pemberdayaan Petani, Dinas Pertanian, Portibi

ABSTRACT
**THE ROLE OF AGRICULTURE SERVICES IN EMPOWERMENT OF
FARMER GROUP IN PORTIBI DISTRICT, PADANG LAWAS UTARA
REGENCY**

By
MERY SUSANTI

201801077

The Department of Agriculture always tries to empower farmers, especially those who are members of farmer groups in Portibi District, but they have not been able to run with optimal results, this is because they are faced with various problems including limited facilities and infrastructure, the quality of human resources of officers and members of farmer groups. The purpose of this study was to analyze the role of the Department of Agriculture in empowering farmer groups in Portibi District, North Padang Lawas Regency and to analyze the constraints in empowering farmer groups in Portibi District, North Padang Lawas Regency. This type of research is descriptive qualitative research. The analysis in this study uses the role theory of Iyas Yusuf (stabilizer, facilitator and regulator). The results of this study show the role of the agricultural service in empowering farmer groups in Portibi District, North Padang Lawas Regency, but has not been optimal. Constraint factors in empowering farmer groups in Portibi District, North Padang Lawas Regency, include a limited budget and lack of facilities and infrastructure. Suggestions from this research are to carry out Technical Training for farmers and officers, Adequate financial support to be provided by local governments..

Keywords: Farmer Empowerment, Department of Agriculture, Portibi

KATA PENGANTAR

Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Medan Area, Sumatera Utara.

Tesis ini berjudul **“Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.** Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari gaya bahasa maupun kedalaman materinya.

Hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis masih sangat terbatas serta kurangnya literatur yang berhubungan dengan pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu tidak ternilai harganya. Oleh karenanya dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat, **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** sebagai Rektor Universitas Medan Area
2. Yang terhormat, ibu **Prof.Dr.Ir.Retna Astuti K,MS** sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Yang terhormat, Bapak **Dr. Budi Hartono. M.Si** sebagai Ka. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Yang terhormat, Bapak **Dr. Syafruddin Ritonga, MAP,** sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.

5. Yang terhormat, Bapak **Dr. Adam, MAP** sebagai pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya tesis ini.
6. Ucapan terima kasih kepada BPP Portibi Kecamatan Portibi Kabupaten Padanglawas Utara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan yang penulis ajukan.
7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019 Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik UMA.
8. Ucapan terima kasih kepada para staf Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Atas semua ini, kembali penulis menyampaikan doa kepada Tuhan YME. Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian lanjutan. Akhirnya dengan mengharapkan berkah dari YME, semoga kita memperoleh lindungan-Nya.

Medan, Juni 2022
Penulis



MERY SUSANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Teori Peran	5
2.1.1. Aspek- Aspek Peran.....	6
2.1.2. Perilaku Dalam Peran	6
2.1.3. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)	8
2.1.4. Perbedaan Peran dan Kedudukan	9
2.2 Peran Pemerintah.....	10
2.3 Pertanian	16
2.4. Pemberdayaan	18
2.4.1 Pengertian pemberdayaan	18
2.4.2.Tujuan Pemberdayaan.....	20
2.4.3.Tahapan Pemberdayaan	20
2.5 Kelompok Tani.....	22
2.5.1. Pengaruh Umur dengan Efektivitas Kelompok Tani	24
2.5.2. Pemberdayaan Kelompok Tani.....	25
2.6.Kajian Penelitian Terdahulu	32
2.7.Kerangka Pikir Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Metode Penelitian	41
3.2 Sumber Data	49
3.3 Lokasi Penelitian	49
3.4.Jadwal Penelitian.....	50
3.5.Definisi Konsep	50
3.5.1.Pemberdayaan.....	50
3.5.2.Penyuluhan Pertanian	50

3.6. Definisi Operasional	51
3.6.1. Peran Stabilisator	51
3.6.2. Peran Fasilitator	51
3.6.3. Peran Regulator	51
3.7. Teknik Pengumpulan Data	52
3.8. Teknik Analisis Data	53
3.9. Pengujian Keabsahan Data	54
3.10. Sumber Data dan Informan Penelitian	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Profil Padang Lawas Utara	57
4.2. Sekilas tentang Kecamatan Portibi Kabupaten Padang lawas Utara	62
4.3. Gambaran Singkat Pertanian di Kecamatan Portibi	67
4.4. Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara	69
4.5. Peran Dinas Pertanian dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Portibi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	71
4.5.1. Stabilisator	71
4.5.2. Fasilitator	82
4.5.3. Pelopor/ Regulator Pelaksana	89
4.6. Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara	95
4.6.1. Cara Terbatas	95
4.6.2. Penyuluhan	95
4.6.3. Pengetahuan dan Wawasan	95
BAB V PENUTUP	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman Soeharto Indonesia sempat menjadi salah satu Negara yang mampu untuk berswasembada beras, hal ini dapat dilihat bahwa dahulu petani Indonesia hidupnya jauh lebih makmur dari pada petani sekarang. Banyak orang yang bilang bahwa Indonesia merupakan Negara yang kaya akan beras, namun melihat kenyataannya masih banyak sekali orang yang mengalami kelaparan. Ini disebabkan belum meratanya ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu tugas negara untuk mampu mensejahterakan rakyatnya. Adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007, pada tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani merupakan salah satu bagian dari peranan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dalam hal ini petani, petani diatur dan ditata dalam wadah kelompok tani di tiap desa ditingkat Kecamatan sehingga memudahkan proses penyuluhan pertanian. Dan ini juga sejalan dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani. Kemudian dalam Undang-undang No.16 Tahun 2006 tentang Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (RPPK) maka pemerintah mewujudkan revitalisasi pertanian yang luas, sehingga mampu mencerdaskan para petani, dapat merubah sistem pertanian untuk lebih maju dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dalam hal ini diperlukan perangkat penyuluh pertanian yang proaktif dengan petani dan penyuluh yang profesional.

Dukungan sumberdaya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang dapat mendukung sistem agribisnis berbasis Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan).

Pemberdayaan petani secara individu tentu sangat sulit dilakukan oleh Pemerintah, agar para petani dapat dibina dengan lebih mudah maka mereka dapat bergabung dalam wadah yang dikenal dengan kelompok tani. Pemberdayaan kelompok tani merupakan konsep yang dikembangkan untuk memperkuat kemandirian petani. Dimana pemberdayaan kelompok tani meliputi peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani melalui penyuluh dan pelatihan, pengembangan jaringan usaha melalui kerjasama, koordinasi dan komunikasi serta peningkatan peran pembinaan melalui motivasi, fasilitasi dan bimbingan teknis. Kelompok tani sangat berperan dalam menjembatani dan menerjemahkan program-program pemerintah dibidang peningkatan produksi pertanian. Dengan demikian, pembinaan kelompok tani dipedesaan merupakan hal penting dalam rangka membangkitkan, mengembangkan dinamika dan kemandirian kelompok tani dipedesaan. Dalam hal ini kelompok tani merupakan kumpulan petani-petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya.

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu Kabupaten diprovinsi Sumatera Utara, mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidupnya dalam bidang pertanian dan tergabung dalam kelompok tani yang tersebar di beberapa Kecamatan. Kecamatan Portibi dengan Luas areal pertanian 4.544 ha dengan jumlah petani Sebanyak 3.801 petani. Di Kecamatan Portibi terdapat kelompok

tani 174 dan tersebar di 36 desa. Kelompok tani yang ada di Kecamatan Portibi belum dapat berjalan dengan hasil yang optimal hal ini karena dihadapkan kepada berbagai permasalahan diantaranya adalah belum seluruhnya memiliki sumber daya yang berkualitas artinya bahwa kualitas para anggota kelompok masih terbatas karena rendahnya tingkat pendidikan dari anggota kelompok tani, sarana yang dimiliki kelompok tani untuk mengolah usaha masih terbatas, motivasi untuk bekerja dari para petani juga bervariasi, serta kemampuan sumberdaya modal sangat terbatas. Dengan kondisi seperti ini maka tentu sangat diperlukan peranan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani. Persoalan diatas mengakibatkan kesejahteraan petani hanya menjadi impian saja ketika tidak dibenahi.

Untuk dapat memahami lebih terperinci dapat diperoleh dari hasil penelitian, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul : **Peran Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana peran Dinas pertanian Dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?
- Apa faktor kendala dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis peran Dinas pertanian Dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Untuk menganalisis kendala dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan di Magister Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
- Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara, agar menjadi sebuah pemikiran untuk meningkatkan kualitas dalam memperdayakan kelompok tani.
- Bagi Magister Pasca Sarjana Universitas Medan Area akan melengkapi penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah referensi bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarwono, 2015).

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (roleperformance) (Suhardono,1994).

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh

karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

2.1.1. Aspek- Aspek Peran

Menurut (Sarwono,2015) Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan,yaitu :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksisosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

2.1.2. Perilaku Dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut :

1. Harapan tentang peran(expectation)

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum,bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

2. Norma (norm)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi
2. Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi kedalam dua jenis:
3. Harapan yang terselubung(convert),yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
4. Harapan yang terbuka (overt),yaitu harapan yang diucapkan.
5. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (role demand). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

3. Wujud perilaku dalam peran (performance)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku husus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja,hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya. Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasilakhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran.Dengan demikian, seorang aktor

bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya

Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

1. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.
2. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor).

2.1.3. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai

negatif berubah menjadi positif.

2.1.4. Perbedaan Peran dan Kedudukan

Kedudukan sendiri sering diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya dia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan yang beragam. Dalam pengertiannya, peran (role) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat (Salim, 1991). Menurut (Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, 1982) Peran erat kaitannya dengan status, dimana diantara keduanya sangat sulit dipisahkan. Peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung (Linton, 1984).

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

2.2 Peran Pemerintah

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya - sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. (Riyadi, 2004). Dalam pengertian ini pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan.

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberi acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk

mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat.

2. Pemerintah sebagai dinamisor, yaitu mengerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah).
3. Sebagai dinamisor, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahannya yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahannya sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.
4. Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.
5. Pemerintah sebagai katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat penembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Menurut (Ndraha, 1987) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Menurut (Rasyid, 2000) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan/dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).” Dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Peran dan Fungsi pemerintah daerah adalah sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah merupakan pemerintah yang memiliki kewenangan yang strategis dan mempunyai kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, keadilan, kemakmuran serta ketentraman bagi masyarakat (Hayat., 2018).

Ada 4 peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu:

- a. Entrepreneur yaitu pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha.
- b. Koordinator sebagai menetapkan kebijakan dan mengusulkan strategi dalam

pembangunan.

- c. Fasilitator sarana dan prasarana.
- d. Stimulator yaitu sebagai pendorong dalam pengembangan usaha melalui tindakan.

(Davey,2011) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan,antara lain :

- 1) Sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
- 2) Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
- 3) Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- 4) Fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat diluar wilayah mereka.
- 5) Fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Menurut (P, 2012) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legalstate*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan

kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain :kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melaluipendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
2. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.
3. Pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebihdahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasisistem, prosedur dan metode kerja

4. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadinegara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negaralain. Untuk mewujudkan haltersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
5. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan Negara
6. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu polasikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan

posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

2.3 Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan dalam usaha mengembangkan (reproduksi) tumbuhan dan hewan dengan maksud supaya tumbuh lebih baik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pertanian juga sebagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi berupa penanaman tanaman atau usaha tani (pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan), peternakan (beternak) dan perikanan (budidaya dan menangkap). Sementara petani adalah orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan hidupnya didalam bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil laut. Sektor pertanian memiliki cabang-cabang sektor atau sub sektor yang membentuk sektor pertanian tersebut. Sub sektor tersebut adalah subsector tanaman pangan, sub sektor tanaman perkebunan, subsector peternakan dan hasilnya, sub sektor kehutanan dan subsector perikanan. Pembagian sub sektor tersebut sama halnya terkait definisi pertanian itu sendiri. Pertanian adalah semua kegiatan yang meliputi penyediaan komoditi tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Semua kegiatan penyediaan tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan itu dilakukan secara sederhana, yang masih

menggunakan peralatan tradisional.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal. Strategi disesuaikan dengan tujuan akhir sedangkan taktik berkaitan dengan tujuan antara. Dalam organisasi bisnis, strategi adalah cara untuk mencapai laba yang besar sebaliknya dalam organisasi nonbisnis strategi adalah cara untuk memuaskan anggotanya (Sjafrizal,2008). Dalam pertanian, strategi merupakan cara yang dilakukan untuk mengembangkan sector pertanian untuk memperoleh hasil produksi yang lebih besar dan hasil produksi yang lebih unggul. Strategi pengembangan pertanian yang ada saat ini diantaranya:

1. Pembangunan pertanian wajib mengedepankan riset dan pengembangan (R&D), terutama yang mampu menjawab tantangan adaptasi perubahan iklim.
2. Integrasi pembangunan ketahanan pangan dengan strategi pengembangan energi, termasuk energi alternatif. Strategi ini memang baru berada pada tingkat sangat awal sehingga Indonesia tidak boleh salah melangkah.
3. Pembangunan pertanian perlu secara inheren melindungi petani produsen (dan konsumen).

Komoditas pangan dan pertanian mengandung risiko usaha seperti faktor musim, jeda waktu (time-lag), perbedaan produktivitas dan kualitas produk yang cukup mencolok. Mekanisme lindung nilai (hedging), asuransi tanaman, pasar lelang dan resi gudang adalah sedikit saja dari contoh instrumen penting yang mampu mengurangi risiko usaha dan ketidak pastian pasar. Operasionalisasi dari strategi ini, perumus dan administrator kebijakan di tingkat daerah wajib mampu mewujudkannya menjadi suatu langkah aksi yang

memberi pencerahan kepada petani, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat organisasi kemasyarakatan untuk mampu berperan dalam pasar berjangka komoditas yang lebih menantang.

Pembangunan pertanian tidak hanya berhenti sampai proses produksi, pemasaran produk pertanian menjadi pekerjaan dan tugas berikutnya yang tidak mudah. Produk pangan utama, misalnya beras, mungkin relatif mudah untuk menemukan pasar karena pasti akan diperlukan, setidaknya di dalam negeri. Persoalan muncul ketika kita berhadapan dengan pemasaran produk-produk bukan pangan utama, khususnya hortikultura, terlebih lagi di pasaran internasional. Tekanan persaingan dengan negara-negara produsen lain, termasuk di dalamnya tekanan akibat regulasi perdagangan dunia yang diterapkan di zona-zona ekonomi tertentu, menambah kesulitan di dalam menemukan pasar bagi produk pertanian Indonesia.

2.4. Pemberdayaan

2.4.1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an- menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan (Risyanti, 2006).

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Empowerment”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “power” yang berarti

kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas (Lili Baridi).

Menurut (Sugarto, 2005) Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial, 2005). Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat

untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

2.4.2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut (Soekanto, Sosial Suatu Pengantar, 1987) Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a) Kelompok lemah secara stuktural, naiklemah secarakelas, gender, maupun etnis.
- b) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

2.4.3. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat

yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pad dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2. Tahapan pengkajian (assessment): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feelneeds) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap pemformalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam

tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilaksanaan.

6. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

2.5 Kelompok Tani

Kelompok adalah sebuah unit yang tersusun dari dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain dan menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang ideal. Definisi ini menekankan bahwa kelompok tumbuh karena adanya kesamaan motivasi untuk mencapai maksud tertentu yang menimbulkan kontak-kontak antar mereka sehingga terbentuklah kelompok. Ciri-ciri suatu kelompok antara lain adalah:

1. Adanya interaksi antar anggota yang berlangsung secara berkelanjutan
2. Adanya hubungan timbal balik antara anggota satu dengan lainnya
3. Adanya kesepakatan bersama antar anggota mengenai norma-norma yang

- berlaku, nilai-nilai yang dianut dan tujuan atau kepentingan yang akan dicapai
4. Adanya struktur dalam kelompok, para anggota mengetahui adanya
 5. hubungan-hubungan antar peranan, norma tugas, hak dan kewajiban yang semuanya tumbuh di dalam kelompok itu(Winardi,2004)

Dengan demikian, kelompok tani yang terbentuk atas dasar adanya kesamaan kepentingan diantara petani menjadikan kelompok tani tersebut dapat eksis dan mampu untuk melakukan akses kepada seluruh sumber daya seperti sumber daya alam, manusia, modal, informasi, serta sarana dan prasarana dalam mengembangkan usahatani yang dilakukan

Dimensi yang harus dicapai dalam penguatan kelompok tani yaitu:

1. Kelompok yang kuat dan lestari, mendapat pengakuan dari pihak lain mendapat bantuan/kredit dari donasi/kreditor dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam proses memperbesar skala usaha tani. Kelompok yang mandiri dan berkesinambungan, lebih leluasa untuk merencanakan setiap langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengkomunikasikan (dan memasarkan) hasil produksi.
2. Kelompok yang solid dan rasa memiliki (solidaritas) memungkinkan untuk berbagi beban yang seharusnya dipikul sendiri menjadi terbantu karena adanya fungsi dan peran masing-masing anggota kelompok.
3. Kelompok yang mampu mengorganisasikan semua anggotanya diharapkan tidak hanya berhasil dalam menumbuhkan proses produksi dalam kenaikan hasil produksi tetapi juga terbuka untuk melakukan pemanfaatan sumberdaya secara maksimal (produk utama maupun limbah) dan

transformasi dari usaha primer (basis peternakan dan pertanian) ke usaha-usaha lain seperti industri rumah tangga, pengadaan input, pengangkutan dan lapangan kerja.

4. Kelompok yang mampu bersatu akan menimbulkan kesadaran tentang apa yang dimiliki (potensi disekitar lingkungan) dan bagaimana menghitungnya, membangkitkannya dan memikirkan tentang bagaimana seharusnya sumber daya ditumbuh-kembangkan dan bagai mana memulihkan sumberdaya yang semakin menipis/hilang.

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi kehidupan dan kelanjutan perkembangan pertanian berada pada petani-petani yang ada, baik petani dewasa maupun generasi penerus bangsa/petani muda. Keberadaan pemuda ditengah-tengah masyarakat sedikit banyaknya memberikan peluang, turut serta membangun kelembagaan petani. Petani muda cenderung memiliki fisik yang kuat dan dinamis dalam mengelola usahataniya sehingga mampu bekerja lebih kuat dari petani yang umurnya lebih tua

2.5.1. Pengaruh Umur dengan Efektivitas Kelompok Tani

Umur sangat berpengaruh terhadap kemajuan kerja petani, kemampuan kerja produktif seorang petani akan terus menurun dengan sendirinya ketika lanjutumur. Hal ini sejalan dengan pendapat (Abdullah, 2006). yang mengemukakan bahwa, kemampuan kerja petani sangat ditentukan oleh umur petani itu sendiri, sehingga mengkategorikan umur berdasarkan kelompoknya bahwa: kisaran umur 0–14 tahun adalah kategori umur non produktif, kisaran umur 15-54 tahun adalah kategori umur produktif, dan kisaran umur 55 tahun

adalah kategori umur kurang produktif.

Umur seseorang pada umumnya dapat mempengaruhi aktivitas petani dalam mengelolah usahatannya, dalam hal ini mempengaruhi kondisi fisik dan kemampuan berpikir. Makin muda umur petani, cenderung memiliki fisik yang kuat dan dinamis dalam mengelola usaha taninya, sehingga mampu bekerja lebih kuat dari petani yang umurnya tua. Selain itu petani yang lebih muda mempunyai keberanian untuk menanggung resiko dalam mencoba inovasi baru demi kemajuan usaha taninya.

2.5.2. Pemberdayaan Kelompok Tani

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia, dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil, dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka. Pemberdayaan masyarakat petani adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usaha secara berkelanjutan. Di Indonesia, perkembangan pemberdayaan petani dikenal dengan program penyuluhan, dimulai bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian pada tahun 1905. Pada masa itu, salah satu tugas departemen tersebut adalah menyalurkan hasil penyelidikan pertanian kepada petani. Lalu, menjelang dan awal Pelita I, melalui program Bimbingan Massal Intensifikasi Massal (Bimas-Inmas), penyuluhan dilakukan besar-besaran. Walaupun demikian, praktis sejak perang kemerdekaan orientasi kegiatan penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan produksi bahan makanan pokok rakyat Indonesia yaitu beras.

Puncak pengaruh langsung mau pun tidak langsung pelaksanaan penyuluhan adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, yaitu beras yang diakui secara internasional pada sidang FAO 1985 di Roma. Namun, landasan penyuluhan yang selama ini diketahui hanya sekedar meningkatkan produksi perlu dikaji kembali. Selain itu, kelembagaan atau institusi (pendidikan atau pemerintahan atau birokrasi) yang juga lebih berorientasi pada peningkatan produksi sektor pertanian (termasuk subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) juga perlu ditinjau kembali.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomirakyat. Dalam rangka mencari solusi masalah ekonomi dan politik serta budaya yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, semua pihak telah memberikan rambu-rambu untuk tidak terjebak membuat “bungkus baru namun isi lama”. Dari berbagai tawaran alternatif model pemberdayaan masyarakat, “model ekonomi kerakyatan” secara teoritik telah berkembang menjadi wacana baru saat ini. Paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat sebenarnya bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi, tetapi juga merupakan kenis cayaan ideologis dengan semangat meruntuhkan dominasi-dominasi birokrasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat. Untuk itu, maka pemberdayaan ekonomi rakyat (dalam penerapan untuk petani dan nelayan kecil) berarti menuju kepada terbentuknya kemandirian petani, yaitu berperilaku efisien, modern dan berdayasaing tinggi. Perilaku efisien artinya berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi secara tepat guna atau berdayaguna.

Beberapa pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat petanimenjuju kemandirian petani, dapat ditempuh dengan berbagai upaya sebagai

berikut:

1. Memulai dengan tindakan mikro dan lokal. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro dan lokal, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro-makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai
2. Pengalaman mikro dapat policy input dan policy reform sehingga memiliki dampak yang lebih luas. Petugas pemberdayaan atau pendamping masyarakat tani dan nelayan kecil seyogyanya diberikan kebebasan untuk mengembangkan pendekatan dan cara yang sesuai dengan rumusan tuntutan kebutuhan setempat atau lokal di wilayah tugasnya masing-masing.
3. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Karena masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan diberlakukan juga berbeda antar daerah. Pemberlakuan kebijakan secara seragam untuk semua daerah harus ditinggalkan.
4. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi atau kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar dan lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antarkawasan yang lebih produktif.
5. Membangun kembali kelembagaan masyarakat. Peranserta masyarakat

menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat, jika tidak dibarengi munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. Misalnya lumbung desa dan organisasi lokal lainnya dipersilahkan tetap hidup.

6. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan masyarakat lokal pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Temuan-temuan lokal oleh petani dan nelayan setempat harus mendapatkan pengakuan sejajar dan dipersilahkan bebas berkompetisi dengan inovasi baru dari luar. Pola penyuluhan yang bersifat sentralistik, topdown dan linier perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih dialogis dan hadap masalah.

7. Pengembangan kesadaran pelaku ekonomi. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal dengan politik ekonomi, maka tindakan yang hanya berorientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Komitmen para petugas pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait pada pengembangan kemandirian petani dan nelayan kecil merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.

8. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerja sama dalam mengatasi keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Salah satu yang sudah waktunya dibangun adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi dan sistem informasi pendukungnya yang memanfaatkan seperti internet untuk membukapintu gerbang seluas-luasnya bagi petani dan nelayan atas informasi yang diperlukan bagi pengembangan usahanya (setidaknya melalui mediasi para petugas penyuluh atau pendamping pemberdayaan masyarakat).

9. Kontrol kebijakan. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Sebagai contoh adalah keikutsertaan organisasi petani dan nelayan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanian dan perikanan.

Dengan memperhatikan arah tantangan pertanian dan perikanan itu seharusnya dikembangkan ke arah agribisnis, maka perlu mendapat penekanan bahwa sasaran strategis pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga sebagai upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat dan sumber daya lokal yang handal. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat melainkan juga aspek-aspek penting dan mendasar lainnya.

Beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat petani antara lain :

- a. Pengembangan organisasi atau kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat, misalnya berfungsinya HKTI dan organisasi

lokallainya.

- b. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok atau organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani dan nelayan, misalnya asosiasi dari organisasi petanidannelayan, baik dalam skala nasional, wilayah, maupun lokal.
- c. Kemampuan kelompok petani dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi. Disinilah maka perlunya ekonomi jaringan dikembangkan.
- d. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik. Disini, selain masyarakat sasaran (petani dan nelayan), juga para petugas penyuluh atau pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan, karena banyak diantara mereka justru ketinggalan kemampuannya dengan kelompok sasarannya.

Pengembangan kemandirian kelompok tani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok tani, dalam hal itu penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani, pendamping dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani sebagai berikut :

- a. Penguatan sumberdaya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak

kemajuan kelompok tani, dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri.

- b. Pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani.

Inti dari pemberdayaan kelompok tani tersebut adalah pendelegasian kekuasaan dan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan konsep memberi visi untuk masa depan, mengikutsertakan semua anggota dalam suatu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan pada diri mereka, kehormatan dan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan kelompok tani juga dapat diartikan sebagai proses berencana guna meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakan.

Pemberdayaan akan efektif apabila dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam lingkungan kelompok yang seperti:

- a. Saling mempercayai,
- b. Saling mendukung antar anggota
- c. Saling mendukung antar anggota dan pembinaanya sehingga pembinaan tidak mengalami kegagalan.

2.6.Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam menyimpulkan kajian yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, digunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut:

1. Lika Yuniarti, Rita Mariati, Nella Naomi Duakaju, 2017. Judul: Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kelurahan

Sambutan Kota Samarinda. Penyuluh Pertanian merupakan agen perubahan perilaku petani, dengan mendorong masyarakat petani untuk mengubah perilakunya menjadi petani yang lebih mampu dan mampu mengambil keputusan sendiri, yang akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani, untuk mengetahui hambatan penyuluh pertanian di daerah dalam upaya pemberdayaan kelompok tani dan untuk mengetahui apakah ada hubungan peran penyuluh pertanian dengan pemberdayaan kelompok tani di Desa Sambutan Samarinda selama dua bulan dari bulan Maret sampai Mei 2017. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara dan studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah skala Likert, sedangkan untuk mengetahui peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani menggunakan metode analisis korelasi rank spearman, dengan 30 sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh pertanian yang diperoleh dari lima indikator memperoleh skor total sebesar 1,185 dengan skor rata-rata 39,49 yang berarti penyuluh pertanian kurang berperan dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sambutan Samarinda. Ada tiga kendala yang dihadapi penyuluh pertanian dalam upaya pemberdayaan kelompok tani, sulitnya mengumpulkan petani untuk melakukan pertemuan, kurangnya sarana produksi (pupuk), dan keterlambatan datangnya bantuan pemerintah (benih). Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode analisis rank spearman diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan antara

peran penyuluh pertanian dengan pemberdayaan kelompok tani di Desa Sambutan Samarinda.

2. Soetarto, Besti Rohana Simbolon , dan Sabali Zebua. 2019. Judul: Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Untuk Meningkatkan Hasil Panen Padi. Salah satu pemberdayaan masyarakat yang sedang di laksanakan Pemerintah Daerah saat ini diKelurahahan Mabar Hilir adalah Program kelompok tani padi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif.Adapun Teknik Pengumpulan Data yang di gunakan dalam penelitianini adalah wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Jenis dan sumberdata yang di gunakan pada penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tentangPeranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petaniuntuk meningkatkan hasil panen padi, menjelaskan bahwa pemerintahtelah bekerjasama kepada Dinas Pertanian dan Kelautan dalam halmemberikan fasilitas pertanian seperti menyediakan mesin pembajak (Jetor), mesin pompa air, pupuk bersubsidi, benih, mesin perontok padi dengan bermitra kepada penyuluh praktik lapangan (PPL) pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada petani.
3. Misbahuddin, 2015. Judul: Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus Kelurahan, Bontoa Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan).Penyuluhan adalah suatu bentuk pengetahuan terhadap perilaku manusia, dengan adanya suatu kelompok tani maka pengadaan sarana produksi dan penerapan teknologi

lebih mudah terencana dan kerja sama anggota dalam kelompok tani akan lebih baik sehingga kegiatan usaha tani dapat terealisasi dengan baik serta masalah yang dihadapi dalam melaksanakan usaha tani dengan mudah dapat terselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peranan penyuluh pertanian dalam pemberdayaan anggota kelompok tani dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peranan penyuluh dalam memberdayakan petani dalam hal pengetahuan keterampilan dan sikap serta untuk menganalisis apakah dengan adanya pemberdayaan anggota kelompok tani dapat meningkatkan produksi dari usaha tani di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Lokasi ini dipilih dengan cara purposive Sampling (sengaja) yaitu dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat kelompok tani yang sudah lama terbentuk. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2015. Hasil penelitian ini dari data diperoleh selama penelitian mengenai Peran penyuluh terhadap pemberdayaan anggota kelompok petani dapat disimpulkan bahwa peranan penyuluh dalam pemberdayaan anggota kelompok tani pada Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa pada kelompok tani Panjallingan masih tergolong rendah sedangkan pada kelompok Nijalling tergolong tinggi. Hal ini karena masih ada beberapa masalah yang ditemukan di lapangan yang dihadapi baik penyuluh maupun petani sendiri seperti hambatan penyuluh sulitnya menghadapi petani yang tidak ingin bekerja sama, persaingan antar kelompok tani, sedangkan hambatan petani sulitnya mempraktekkan

kebijakan penyuluhan terkendala oleh masalah geografis, waktu, tenaga, usia serta masih kurangnya partisipasi petani dalam penyuluhan pertanian.

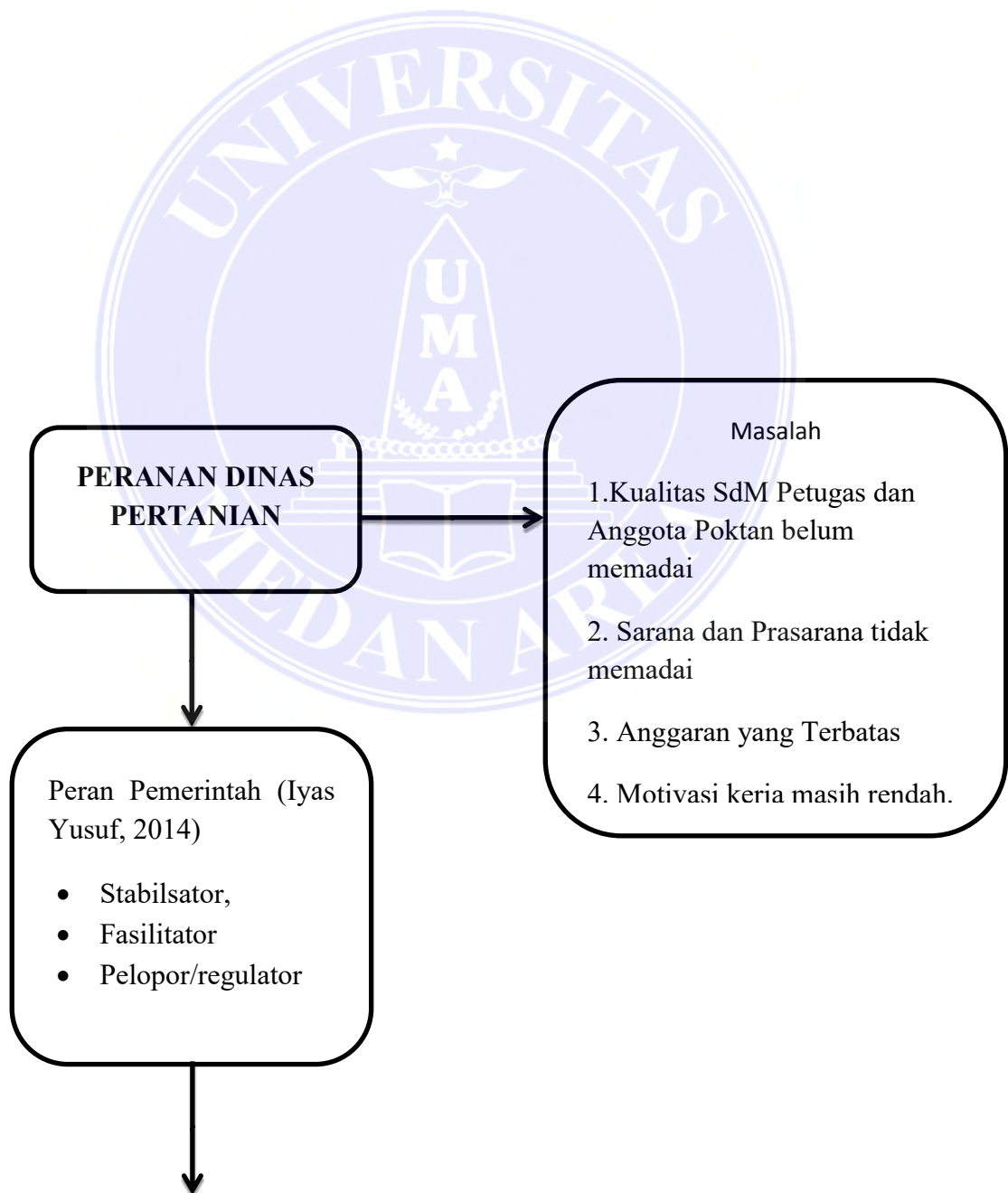
4. Midiansyah Effendi, 2012. Judul: Peranan Kelompok Tani Dalam Mengembangkan Kemandirian Petani Di Kabupaten Tana Tidung. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui peran kelompok tani dalam bingkai pemberdayaan petani menuju kemandirian, (2) untuk mengetahui tingkat kemandirian petani dalam bertani, dan (3) merancang model pemberdayaan manusia. pengembangan sumberdaya untuk mewujudkan kemandirian petani melalui pemberdayaan petani dalam kelompok tani. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Tidung dari bulan Juli sampai dengan Desember 2011 sejak persiapan penulisan laporan. Kegiatan dalam penelitian meliputi: persiapan, observasi lapangan, penelitian lapangan (pengumpulan data primer dan sekunder), tabulasi dan pengolahan data, analisis dan interpretasi, dan pelaporan. Populasi penelitian adalah kelompok tani di Tana Tidung. Sampel penelitian adalah kelompok tani pada sentra produksi padi dan palawija. Sebagai unit analisis (atau sampel) adalah petani individu untuk setiap kelompok tani. Data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Untuk mengetahui peran kelompok tani dalam meningkatkan kemandirian digunakan uji korelasi rank spearman (r_s), sedangkan untuk mengetahui tingkat kemandirian petani dilakukan penskoran dengan ketentuan atau dikategorikan: tinggi, sedang dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat kemandirian kelompok tani di Tana Tidung tergolong sedang, (2) peran dominan kelompok tani merupakan

fungsi dari dinamika gotong royong, karena petani menghargai persamaan dan kebersamaan, kelompok kerja yang dinamis untuk modal sosial menghadapi kemandirian usahatani selanjutnya, di tengah tantangan ketidakpastian harga dan lingkungan, (3) metode penyuluhan yang efektif diterapkan pada kelompok tani yang ada di Tana Tidung adalah: pelatihan dan kunjungan model penyuluhan dan model sekolah lapang, dan (4) Sinergi antara pelayanan pemerintah dan peran kelompok tani harus diperkuat yang meliputi: penguatan personel dan sumber daya petani, penciptaan ketahanan pangan yang stabil, ketersediaan infrastruktur pertanian yang memadai, dan pembentukan kelembagaan agribisnis yang kuat.

2.7. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep pada tesis.

Kerangka pikir dalam penelitian Peran Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan kelompok Tani di Kab. Padang Lawas Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Hasil yang
Diharapkan

Peran Dinas Pertanian
dalam Pemberdayaan
kelompok tani
Kecamatan Portibi kab.
Padang lawas Utara

Hasil yang diharapkan :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

- a. Pemerintah sebagai Regulator Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah

memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

- b. Pemerintah sebagai Stabilisator Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
- c. Pemerintah sebagai Fasilitator Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan , pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Danim, 2002). Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong L. J., 2000)

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan penelitian yang lain. Sebab dalam penelitian ini lebih pada pengungkapan fenomena yang kemudian dideskripsikan. Sebagaimana yang dikutip oleh (Tohirin, 2012), Menurutnya karakteristik dari penelitian kualitatif adalah:

1. Berfokus pada kata
2. Menuntut keterlibatan peneliti (partisipatif)
3. Dipengaruhi sudut pandang partisipan (orang yang menjadi sumber data)
4. Fokus penelitian yang holistik
5. Desain dan penelitiannya bersifat fleksibel
6. Lebih mengutamakan proses dari pada hasilnya
7. Menggunakan latar alami
8. Menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Metode dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.2 Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data-datayang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baikdata primer maupun data skunder. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subyek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan (Silalahi,2003)
2. Data sekunder merupakan data yang bukan dihasilkan dan dikumpulkan oleh peneliti melainkan diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah. Sumber data sekunder merupakan data untuk melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel-artikel dari website, internet, beritayang relevan dan beberapa literatur yang relevan

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara, yang beralamat di desa Huta Lombang, Kec. Padang Bolak, khususnya untuk masyarakat dari kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753.

3.4. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian dijadwalkan pada bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022, dari mulai pengajuan judul sampai penyelesaian tesis. Rincian jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.
Rencana Waktu Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	2022											
		April			Mei			Juni			Juli		
1	Pengajuan judul												
2	Penyusunan Proposal	■	■	■									
3	Seminar Proposal			■									
4	Pengumpulan Data				■	■							
5	Pengolahan Data					■	■	■	■				
6	Penulisan Laporan									■	■		
7	Seminar Hasil										■		
8	Penyelesaian Laporan											■	■
9	Sidang Tesis												■

3.5. Definisi Konsep

3.5.1. Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan kelompok tani merupakan konsep yang dikembangkan dalam memperkuat kemandirian petani. Kemampuan dan peningkatan kesadaran petani melalui pendampingan, penyuluhan dan pelatihan. Pengembangan usaha jaringan melalui kerjasama, peningkatan pembinaan melalui motivasi, fasilitasi dan bimbingan teknis.

3.5.2. Penyuluhan Pertanian

Konsep penyuluhan pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar

mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya.

3.6. Definisi Operasional

3.6.1. Peran Stabilisator

Peran pemerintah sebagai stabilisator mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan insentif kepada masyarakat untuk bergerak dan berpartisipasi dalam proses pembangunan (Yusuf, 2014). Dalam konteks penelitian ini peran sebagai stabilisator dilihat bagaimana peran dinas pertanian untuk mendorong kelompok tani lebih aktif dalam pengembangan sektor pertanian.

3.6.2. Peran Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator baik berperan dalam menghubungkan kepentingan pemerintah dengan masyarakat maupun sebaliknya dalam hal optimalisasi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah (Yusuf, 2014). Dalam konteks penelitian ini peran fasilitator dilihat bagaimana dinas pertanian dapat menjadi jembatan kepentingan pemerintah Kabupaten dengan ketersediaan SDM pada kelompok tani untuk berkembang.

3.6.3. Peran Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator menandakan bahwa pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat bertanggung jawab merumuskan arah untuk mencapai keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan (Yusuf, 2014). Dalam konteks penelitian ini peran regulator dilihat

bagaimana dinas pertanian bertanggung jawab dalam arah startegis yang ingin dicapai dalam pengembangan pertanian.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2006)

2. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerjasama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam

wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung (Arikunto, 2002)

3. StudiPustaka

Dalam studi pustaka peneliti menggunakan berbagai media dan sumber seperti koran, majalah, buku, internet, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan reduksi data atau penyederhanaan data, paparan atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan tiga jalur dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data (data reduction)

Ketika data yang diperoleh di lapangan itu telah bisa dikatakan cukup banyak, maka perlu adanya pencatatan secara teliti dan terperinci. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data yang diperoleh pun semakin banyak. Dengan demikian peneliti harus segera menganalisis data tersebut melalui reduksi data. Yang dimaksud dengan mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan lebih memfokuskan padahal-hal yang dianggap penting, serta mencari tema dan polanya. Sehingga dari data diperoleh tersebut mendapatkan gambaran

yang sangat jelas. Dimana hal tersebut mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari kekurangan-kekurangan data yang diperlukan.

2. Penyajian data (data display)

Setelah melaksanakan reduksi, maka langkah selanjutnya dalam penelitian adalah mendisplay data. Terutama didalam penelitian kualitatif, perlu adanya pendisplayan data. Dalam penyajian data perlu adanya pengorganisasian data secara sistematis yang mana pola hubungan tersebut mudah untuk dipahami. Penyajian data yang sering digunakan didalam penilaian kualitatif yakni penggunaan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah peneliti yang terakhir ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana dalam penemuannya dapat berbentuk deskriptif atau gambaran dari suatu objek yang masih belum jelas atau masih samar dan tak terlihat, sehingga dengan dilaksanakan penelitian menjadi jelas. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan pada saat penelitian telah selesai dilaksanakan, mulai dari dilaksanakannya observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dan juga diperkuat dengan adanya dokumentasi sebagai bukti atas adanya penelitian.

3.9. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perludilakukan uji keabsahandata. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data,dan waktu.

3.10 Sumber Data dan Informan Penelitian

Jenis dan sumber data sangat penting dalam penelitian dan lebih lanjut digunakan peneliti untuk memperoleh data-data penelitian sehingga meminimalkan waktu dan biaya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer .Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan

wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang di peroleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Sumber Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, literature dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Peneliti memperoleh data melalui beberapa informan antara lain adalah;

1. Marahamid, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Parhontian Harahap, Staff Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Gusti Harahap, Camat Kecamatan Portibi
4. Abdul Gozali, Kabid Pemberdayaan Kecamatan Portibi
5. Samshudin Ritonga. PPL Kecamatan Portibi
6. Mahmudin Nasution. PPL Kecamatan Portibi
7. Ali Akbar Harahap, Ketua Kelompok Tani Sabar Menanti
8. Syahril Harahap Ketua Kelompok Tani, Mekar
9. Abdul Manaf Dalimunthe, Anggota Kelompok Tani Sabar Menanti
10. Sudirman Rambe, anggota Kelompok Tani Sabar Menanti
11. Sandi Siregar, Anggota Kelompok Tani Sabar Menanti

yang direncanakan untuk memnerdayakan kelompok tani banyak yang tidak dapat direalisasikan karena terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah.



5.1. Kesimpulan

Berdasarekan hasil dan pembahasan dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan :

1. Peran Dinas Pertanian dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Kecamatan Portibi kabupaten Padang Lawas Utara sudah terlaksana tetapi belum optimal. Hal ini berdasarkan analisis teori Iyas Yusus (2014,05) yang meli[uti indicator Stalibilsator, Fasilitator, dan Pelopor/Regulator.
1. Faktor kendala dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Portibi Kabupaten PadangLawas Utara meliputi lain Terbatasnya Sarana dan Prasarana , Kualitas SDM Petugas dan Kelompok Tani rendah, Terbatasnya Anggaran.

2. 5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik anggota kelompok tani maupun petugas penyuluh perlu diadakan diklat teknis dengan dinas terkait dengan usaha kelompok tani.
2. Agar upaya pemberdayaan kelompok tani dapat terlaksana dengan baik maka diharapkan kepada pemerintah daerah memberikan anggaran yang memadai untuk memenuhi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.



DAFTARPUSTAKA

- Abdullah, I. (2006). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: GavaMedia.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Davey, P. (2011). *Ata Glance Medicine*. Jakarta: Erlangga.
- Hayat, e. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Prespektif Makro dan Mikro*. Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP (Divisi Kencana).
- Iyas, Y. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora

- Lili Baridi, M.Z. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: CED.
- Linton, R. (1984). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Mardikanto, T. d. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Moleong, L.J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (1987). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- P, S.S. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Daya Widya.
- Riyadi, B. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Salim, P.S. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sarwono, S.W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silalahi, G.A. (2003). *Metode Penelitian Dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Soekanto, S. (1982). *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1987). *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawalipress.
- Sugarto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Ravika Adimatama.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung:

Alfabeta.

Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*.

Bandung: PT Refika Aditama.

Suharto,E.(2005).*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian*

Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan pekerja Sosia.

Bandung: Ptrevika Aditam.

Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan*

Konseling. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Winardi, J. (2004). *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: Raja

Grafindo perkasa.

Zubaedi.(2013).*Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*. Jakarta:

Kencana.

